



Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 12 Februari 2018

Halaman: 14

▶ DAERAH PEMILIHAN

## Waspada Isu SARA dalam Kampanye

JETIS—Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mewaspadai kampanye dengan menggunakan isu suku agama, ras dan antargolongan (SARA). Jika terjadi, hal itu akan merusak penyelenggaraan pemilu di Jogja.

Selain itu, kecenderungan publik pada rancangan pertama daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2019 harus diikuti dengan keinginan evaluasi dari penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Narasita, Reny Anggriana Frahesty merespons banyaknya suara yang masih bertahan dengan opsi lima dapil tersebut.

"Memang sudah teruji, kami juga sepemahaman namun penyelenggara harus belajar dengan pengalaman yang lalu, agar semakin baik hasilnya," katanya kepada *Harian Jogja*, Sabtu (10/2).

Perempuan yang juga hadir dalam uji publik yang digelar KPU Kota Jogja akhir pekan kemarin mengatakan ada berbagai masalah yang kerap muncul dalam pemilu. Diharapkan adanya konsistensi dapil ini sekaligus berdampak positif pada penanganan konflik pemilu.

Selain itu, menilai perkembangan politik belakangan ini, Reny berharap ada kewaspadaan jika ada yang melemparkan isu SARA sebagaimana terjadi di kota lainnya. Meski demikian, ia mengakui jika isu SARA tidak terlalu efektif pada pemilu legislatif, berbeda dengan pemilihan kepada daerah yang sarannya lebih jelas.

Narasita, tambah Reny, juga cenderung lebih suka jika dapil yang diberlakukan sama dengan Pemilu 2014 lalu. Hal ini sesuai dengan proses pendidikan politik oleh partai yang trennya berjalan baik pascareformasi. Jika dapilnya berubah otomatis proses pembelajaran masyarakat akan terputus dan terpaksa mengulang lagi dari dasar. "Kalau berubah-ubah, kan harus belajar lagi dari nol," ungkapnya.

Ketua Panwas Kota Jogja, Iwan Ferdian mengata pada prinsipnya pihaknya tidak memiliki dukungan terhadap opsi manapun. "Kami siap apapun yang diputuskan KPU RI," katanya.

Keputusan yang diambil untuk menentukan dapil yang penting sudah mengakomodasi tujuh prinsip pembentukannya dan sesuai peraturan perundangan. Selain itu, keputusan tersebut harus bisa diterima publik. Lebih lanjut, apabila sudah ditetapkan, ditekankan untuk diinformasikan sedemikian rupa kepada masyarakat dari semua segmen dan lapisan secara masif. "Agar semuanya terpapar informasi dan mengetahuinya," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan ada kecenderungan pada rekayasa pertama dengan alasan sudah memenuhi tujuh prinsip penyusunannya dan pertimbangan aspek konduktivitas pelaksanaannya.

"Hasil uji publik kecenderungannya dengan dapil yang berkesinambungan dengan 2014 lalu," ujarnya.

Jika diperlukan adanya perubahan dapil maka sebaiknya dilakukan saat Pemilu 2019 berakhir atau dalam tahap evaluasi pemilu tersebut. (Sekar Langit Nariswari)

- KPU Kota Jk

✓ Netral

✓ Biasa

✓ Untuk diketahui

### RANCANGAN DAPIL Pemilu 2019

Rancangan Pertama	Rancangan Kedua	Rancangan Ketiga
<b>Dapil I (Karsi 9)</b> • Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergansari. <b>Dapil II (Karsi 7)</b> • Kecamatan Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, dan Wirobrajan. <b>Dapil III (Karsi 8)</b> • Kecamatan Gedongtengen, Jetis dan Tegayrejo <b>Dapil IV (Karsi 6)</b>	<b>Dapil I (Karsi 9)</b> • Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergansari. <b>Dapil II (Karsi 7)</b> • Kecamatan Gondomanan, Ngampilan, Pakualaman, dan Wirobrajan. <b>Dapil III (Karsi 8)</b> • Kecamatan Gedongtengen, Jetis dan Tegayrejo <b>Dapil IV (Karsi 6)</b> • Kecamatan Danurejan, dan Gondokusuman	<b>Dapil I (Karsi 9)</b> • Kecamatan Kraton, Mantrijeron, dan Mergansari. <b>Dapil II (Karsi 6)</b> • Kecamatan Gondomanan, Ngampilan, dan Wirobrajan. <b>Dapil III (Karsi 8)</b> • Kecamatan Gedongtengen, Jetis dan Tegayrejo <b>Dapil IV (Karsi 7)</b>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005